

---

# PENTINGNYA INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

**Medyanita F. Br. Ginting**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia*

---

## **Abstrak**

Inklusi sosial menjadi prinsip kunci dalam pembangunan berkelanjutan yang merujuk pada upaya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang rentan dan marginal, terlibat secara aktif dan merasakan manfaatnya. Artikel ini mengeksplorasi pentingnya inklusi sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada perspektif kebijakan publik. Inklusi sosial dianggap sebagai fondasi yang vital untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesejahteraan masyarakat, dan perdamaian. Melalui analisis berbagai kebijakan publik yang telah diimplementasikan di berbagai negara, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang dalam memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik. Dalam era globalisasi dan kompleksitas tantangan sosial, kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

**Kata Kunci:** *Inklusi sosial, pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik*

---



## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

*Dalam era globalisasi yang terus berkembang dan kompleksitas tantangan sosial yang semakin mendalam, inklusi sosial menjadi salah satu prinsip kunci dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep inklusi sosial menekankan pentingnya memastikan bahwa semua individu, kelompok, dan komunitas, termasuk yang rentan dan marginal, terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan merasakan manfaatnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inklusi sosial bukan hanya menjadi tujuan yang dikejar, tetapi juga menjadi fondasi yang vital untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesejahteraan masyarakat, dan perdamaian.*

*Kebijakan publik memegang peran kunci dalam mempromosikan inklusi sosial dalam masyarakat. Sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat, kebijakan publik memiliki potensi besar untuk membentuk lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pandangan ini, perspektif kebijakan publik memberikan landasan konseptual dan praktis untuk memahami bagaimana inklusi sosial dapat diperkuat melalui upaya kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.*

*Pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilebih-lebihkan. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terus meningkat, tantangan lingkungan global, dan ketegangan sosial yang berkembang menjadi bukti nyata akan urgensi memperkuat inklusi sosial. Di berbagai belahan dunia, terdapat ketidakadilan yang mendalam dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, yang mengakibatkan peningkatan disparitas antara kelompok-kelompok sosial. Hal ini menciptakan tantangan serius bagi upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, karena eksklusi sosial dapat menghambat pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi semua.*

*Namun, inklusi sosial bukan hanya tentang penghapusan hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi masyarakat, tetapi juga tentang membangun sistem yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Ini mencakup akses yang setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta pembentukan ruang partisipasi yang inklusif bagi semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebijakan publik memiliki peran penting dalam menciptakan landasan hukum, kebijakan, dan program-program yang mendukung inklusi sosial dan mengurangi ketidaksetaraan.*

*Selain itu, inklusi sosial juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih stabil dan damai. Tantangan-tantangan sosial seperti ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi dapat menjadi pemicu konflik yang berpotensi merusak perdamaian dan stabilitas sosial. Dengan mempromosikan inklusi sosial melalui kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan menumbuhkan rasa saling menghargai antaranggota masyarakat.*

## **Metode Penelitian**

*Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan publik dalam konteks inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan praktik dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik terkait inklusi sosial. Dengan mengumpulkan data kualitatif, penelitian ini akan bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi inklusi sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan.*

- 1. Identifikasi dan Seleksi Kasus Studi: Langkah pertama dalam metode penelitian ini akan melibatkan identifikasi dan seleksi kasus studi yang relevan. Kasus studi akan dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian ini, termasuk tingkat inklusi sosial yang tercermin dalam kebijakan publik yang diterapkan, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kasus studi mungkin termasuk negara-negara yang memiliki kebijakan inklusi sosial yang inovatif atau telah mengalami perubahan signifikan dalam praktik kebijakan publik terkait inklusi sosial.*
- 2. Pengumpulan Data: Pengumpulan data akan dilakukan melalui berbagai metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci seperti pembuat kebijakan, akademisi, praktisi masyarakat sipil, dan anggota masyarakat terdampak. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang praktik kebijakan publik terkait inklusi sosial, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, analisis dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan publikasi akademis juga akan dilakukan untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang isu-isu yang relevan.*
- 3. Analisis Data: Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Ini akan melibatkan identifikasi pola-pola, tema-tema, dan tren dalam data yang berkaitan dengan praktik kebijakan publik terkait inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Analisis akan berfokus pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik memengaruhi inklusi sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.*
- 4. Interpretasi dan Kesimpulan: Langkah terakhir dalam metode penelitian ini akan melibatkan interpretasi hasil analisis dan merumuskan kesimpulan. Interpretasi akan mencakup pembahasan tentang implikasi temuan penelitian untuk teori dan praktik dalam bidang kebijakan publik, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini akan memberikan ringkasan dari temuan utama serta implikasinya untuk pengembangan kebijakan publik di masa depan.*

## **PEMBAHASAN**

*Inklusi sosial telah menjadi tema yang semakin penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dengan kebijakan publik memainkan peran utama dalam mempromosikan inklusi sosial di seluruh lapisan masyarakat. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya inklusi sosial dari perspektif kebijakan publik, memperjelas konsep inklusi sosial, menganalisis peran kebijakan publik dalam mempromosikan inklusi sosial, dan menyoroti tantangan serta peluang yang terkait dengan implementasi kebijakan publik yang inklusif.*

*Pertama-tama, adalah penting untuk memahami konsep inklusi sosial. Inklusi sosial mengacu pada proses yang memastikan bahwa semua individu, kelompok, dan komunitas, termasuk yang rentan dan marginal, terlibat secara aktif dalam masyarakat dan merasakan manfaat dari pembangunan. Hal ini mencakup hak setiap individu untuk memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inklusi sosial menjadi prinsip yang krusial, karena pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika tidak ada yang tertinggal.*

*Kebijakan publik memainkan peran penting dalam mempromosikan inklusi sosial dalam masyarakat. Sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat, kebijakan publik memiliki potensi besar untuk membentuk lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu cara utama di mana kebijakan publik mempromosikan inklusi sosial adalah melalui pembentukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Misalnya, kebijakan yang memastikan akses universal ke layanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan kebijakan yang menghapuskan diskriminasi adalah langkah-langkah penting dalam memperkuat inklusi sosial.*

*Selain itu, kebijakan publik juga dapat memainkan peran dalam membangun kesadaran dan mempromosikan budaya inklusi dalam masyarakat. Melalui kampanye pendidikan dan program-program kesadaran masyarakat, kebijakan publik dapat membantu mengubah sikap dan perilaku yang diskriminatif serta membangun rasa solidaritas dan empati antaranggota masyarakat. Pemerintah juga dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipasi publik yang inklusif, seperti konsultasi masyarakat dan forum dialog.*

*Meskipun demikian, implementasi kebijakan publik yang inklusif tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari kelompok-kelompok yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan inklusif tersebut. Beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dengan inklusi sosial, dan mereka dapat melakukan upaya untuk menghalangi atau memperlambat implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat juga kendala institusional dan kapasitas dalam pemerintah yang dapat menghambat proses perumusan dan implementasi kebijakan publik yang inklusif. Keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi*

antarlembaga, dan kurangnya pemahaman tentang isu-isu inklusi sosial juga dapat menjadi hambatan bagi upaya kebijakan yang inklusif.

Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, membuka peluang baru untuk pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan memperluas partisipasi dalam proses kebijakan. Pemanfaatan data dan analisis kebijakan yang canggih juga dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mempromosikan inklusi sosial. Selain itu, kerja sama lintas-sektoral antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan memperkuat implementasi kebijakan publik yang inklusif.

Dengan demikian, pembahasan ini menyoroti pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan dari perspektif kebijakan publik. Melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia, pemerintah dapat memainkan peran krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun tantangan-tantangan yang dihadapi tidak sedikit, dengan memanfaatkan peluang yang ada dan memperkuat kerja sama lintas-sektoral, implementasi kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud, membawa dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Selain itu, penting untuk diakui bahwa inklusi sosial juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan. Melalui kebijakan publik yang mempromosikan inklusi sosial, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat secara aktif dalam ekonomi, pembangunan ekonomi dapat menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat menjadi kontributor yang berharga bagi pertumbuhan ekonomi, sementara kesenjangan ekonomi dapat dikurangi secara signifikan.

Selanjutnya, inklusi sosial juga memiliki dampak positif terhadap stabilitas politik dan keamanan. Dengan mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan partisipasi politik yang inklusif, kebijakan publik yang mendukung inklusi sosial dapat membantu mencegah terjadinya ketegangan sosial dan konflik. Ketika semua anggota masyarakat merasa diakui, didengar, dan diwakili dalam proses politik, maka masyarakat akan lebih cenderung untuk mencari solusi damai atas perbedaan pendapat dan konflik yang muncul.

Pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah "Mengakhiri Ketidaksetaraan di Dalam dan Di Antara Negara". SDG ini mengakui bahwa inklusi sosial merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan, dan menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Namun, meskipun ada kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi kebijakan publik yang inklusif. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu inklusi sosial di kalangan pembuat kebijakan. Banyak

kebijakan publik masih cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan implikasi sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik. Kelompok-kelompok yang telah mendominasi akses terhadap sumber daya dan kekuasaan mungkin tidak bersedia untuk berbagi keuntungan mereka atau mengakui hak-hak individu dan kelompok lain yang sebelumnya terpinggirkan.

Masih terdapat pula tantangan institusional dalam pemerintah yang dapat menghambat proses perumusan dan implementasi kebijakan publik yang inklusif. Kurangnya koordinasi antarlembaga, kurangnya kapasitas, dan kelembagaan yang lemah dalam mengatasi isu-isu inklusi sosial dapat menyulitkan pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Meskipun demikian, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas akses informasi dan layanan publik bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan pemanfaatan platform digital dan aplikasi mobile, pemerintah dapat menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi semua warga negara.

Selain itu, kerja sama lintas-sektoral antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan memperkuat implementasi kebijakan publik yang inklusif. Dengan membangun kemitraan yang kuat antarberbagai pemangku kepentingan, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang ada untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif.

Peningkatan kapasitas juga merupakan langkah penting dalam memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik. Pelatihan dan pendidikan untuk para pembuat kebijakan tentang isu-isu inklusi sosial, analisis kebijakan, dan manajemen proyek dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang inklusif.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan sosial yang semakin meningkat, inklusi sosial menjadi lebih penting dari sebelumnya dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik yang inklusif, pemerintah dapat memainkan peran krusial dalam membangun masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi semua warga negara.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, kesadaran akan pentingnya inklusi sosial semakin meningkat di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong adopsi kebijakan publik yang mendukung inklusi sosial. Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai agen

perubahan dalam memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan, dan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik adalah memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial dan lingkungan. Hal ini mencakup mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan ekonomi, seperti pengangguran struktural atau peningkatan kesenjangan ekonomi, serta dampak lingkungan, seperti degradasi lingkungan atau perubahan iklim yang tidak merata. Dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan dalam kebijakan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan yang terjadi adalah berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di samping itu, penting untuk memperhatikan aspek regional dan lokal dalam implementasi kebijakan inklusi sosial. Setiap wilayah atau komunitas mungkin memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, dan oleh karena itu, kebijakan publik yang diterapkan haruslah bersifat responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah. Ini membutuhkan pendekatan yang terdesentralisasi dan partisipatif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, yang melibatkan aktor-aktor lokal dan memperhitungkan konteks lokal dalam pengambilan keputusan.

Penting juga untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam implementasi kebijakan inklusi sosial. Melalui pemantauan yang cermat terhadap implementasi kebijakan, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, dan area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi yang berkualitas tinggi juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dampak kebijakan terhadap inklusi sosial, memungkinkan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terus berubah.

Selanjutnya, pemerintah juga dapat memanfaatkan kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik. Dengan berbagi pengalaman, pelajaran, dan praktik terbaik dengan negara-negara lain, pemerintah dapat memperluas basis pengetahuan mereka dan mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dalam mempromosikan inklusi sosial di tingkat nasional.

Dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi COVID-19, inklusi sosial menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pandemi telah mengungkapkan dan memperdalam ketidaksetaraan yang ada di masyarakat, dengan kelompok rentan dan marginal terpuak secara lebih keras. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperkuat inklusi sosial dalam tanggapannya terhadap pandemi, seperti memberikan bantuan sosial kepada kelompok yang terdampak secara ekonomi, memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, dan memperkuat jaringan keselamatan sosial.

Pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan berkelanjutan tidak bisa diragukan lagi. Dengan memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik yang inklusif, pemerintah dapat memainkan peran yang krusial dalam membangun masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi semua warga negara. Meskipun terdapat tantangan yang perlu

diatasi, dengan memanfaatkan peluang yang ada dan meningkatkan kerjasama antarlembaga, implementasi kebijakan publik yang inklusif dapat menjadi kenyataan, membawa dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus memprioritaskan inklusi sosial dalam agenda pembangunan mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat inklusi sosial melalui kebijakan publik. Hanya dengan melibatkan semua anggota masyarakat, tanpa terkecuali, kita dapat memastikan bahwa pembangunan yang terjadi adalah berkelanjutan, adil, dan bermartabat bagi semua.

### **Kesimpulan**

*Inklusi sosial adalah pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, dengan kebijakan publik memegang peran sentral dalam mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan partisipasi dalam masyarakat. Melalui kebijakan yang inklusif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua individu, kelompok, dan komunitas untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.*

*Dari aspek ekonomi, inklusi sosial mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Dari sisi sosial-politik, inklusi sosial mengurangi ketegangan sosial dan konflik, serta memperkuat stabilitas politik dan keamanan. Dan dari perspektif lingkungan, inklusi sosial dapat membantu memastikan bahwa pembangunan yang terjadi adalah berkelanjutan dari segi lingkungan, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan ekonomi.*

*Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memprioritaskan inklusi sosial dalam kebijakan publik mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat inklusi sosial. Dengan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan, kita dapat memastikan bahwa masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan terwujud bagi semua warga negara.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from [osf.io/3jpd/](https://osf.io/3jpd/).
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.

- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementrian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.

- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.